

**KINERJA WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM MERESPON
KEPENTINGAN PEREMPUAN**

(Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran)

SKRIPSI

Virginda Erwantara

NPM : 1931040099



Program Studi : Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444H/2023M

**KINERJA WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM
MERESPON KEPENTINGAN PEREMPUAN
STUDI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PESAWARAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas -Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Prodi Pemikiran Politik Islam



Oleh :

Virginda Erwantara

1931040099

**PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Kepentingan perempuan dalam bidang politik juga, perlu adanya perhatian baik itu dari Wakil Rakyat maupun dari Pemerintah Pusat. Dengan Lahirnya Undang-Undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) membuktikan bahwa sering sekali terjadi kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan karena cara pandang kaum pria terhadap perempuan. Begitu pula dalam kasus hubungan suami-istri, kaum perempuan cenderung diperlakukan tidak sejajar dan dalam posisi bargaining yang lemah sehingga dominasi dan ego kaum laki laki seolah-olah mendapatkan tempat yang lebih baik.

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Bagaimana kinerja wakil rakyat perempuan Kabupaten Pesawaran dalam merespon kepentingan perempuan? Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui kinerja wakil rakyat perempuan Kabupaten Pesawaran dalam merespon kepentingan perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD perempuan, dan observasi partisipatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja wakil rakyat perempuan dalam menjalankan tugas dan wewenang bisa dilihat pada periode ini dalam mencapai kualitas atau memperjuangkan hak-hak perempuan di kabupaten pesawaran sudah baik yang dilihat dari indikator responsivitas. Dimana dukungan antara fraksi dan komisi dalam memenuhi kepentingan masyarakat khususnya perempuan sudah sejalan dalam hal ini fraksi dan komisi memberikan ruang dialog untuk berdiskusi tentang permasalahan yang ada. Faktor penghambat kinerja wakil rakyat perempuan kabupaten pesawaran adalah masih banyak masyarakat yang berpihak kepada laki-laki bahwa laki-laki harus memimpin tetapi dari anggota DPRD sendiri memiliki selogan bahwa ‘ perempuan harus pilih perempuan’ untuk mendukung kesetaraan peran di masyarakat dan agar tidak memandang perempuan sebelah mata.

Kata Kunci: Peranan, Anggota DPRD Perempuan, Kepentingan Perempuan.

ABSTRACT

The interests of women in the political field also need attention, both from the People's Representatives and from the Central Government. The birth of the Law on Domestic Violence (KDRT) proves that violence against women often occurs because of the way men view women. Likewise, in the case of husband-wife relations, women tend to be treated unequally and in a weak bargaining position, so that the dominance and ego of men seem to get a better place.

The statement of the problem in this research is: the performance of women's representatives in Pesawaran Regency in responding to women's interests? The purpose of this study was to find out the performance of women's representatives in Pesawaran Regency in responding to women's interests. This research was conducted using a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with female DPRD members and participatory observation.

The results of this study show that the performance of women's representatives in carrying out their duties and authorities can be seen in this period in achieving quality or fighting for women's rights in Pesawaran district, which is good, as seen from the responsiveness indicator. Where the support between factions and commissions in meeting the interests of society, especially women, is in line, in this case, factions and commissions provide space for dialogue to discuss existing problems. The inhibiting factor for the performance of women's representatives in Pesawaran district is that there are still many people who side with men and believe that men have to lead, but DPRD members themselves have a slogan that 'women must choose women' to support equal roles in society and not look down on women.

Keywords: Role, Women DPRD Members, Women's Interests.

PERNYATAAN ORIENTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Virginda Erwantiara
NPM : 1931040099
Jurusan/ Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran**” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023
Penulis,



Virginda Erwantiara
NPM. 1931040099



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI
AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp: (0721) 780887

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KINERJA WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM MERESPON
KEPENTINGAN PEREMPUAN (STUDI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PESAWARAN)

NPM : 1931040099

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk Disidangkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqosah Pada Program Studi Pemikiran
Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Abd. Qohar, M.Si

NIP. 197103122005011005

Pembimbing II

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si

NIP. 197801302011012004

**Mengetahui, Ketua Program Studi
Pemikiran Politik Islam**

Abd. Qohar, M.Si

NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721)703289 Bandar Lampung 35131


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “ **KINERJA WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM MERESPON KEPENTINGAN PEREMPUAN (Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran)**” disusun oleh: **Virginda Erwantiara, NPM: 1931040099**, Program Studi Pemikiran Politik Islam. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN-Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal **Senin 26 Juni 2023**.

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua** : **Agung M, Iqbal, M.Ag** 
- Sekretaris** : **Dwi Rosmawati, S.Tr.Keb, M.Kes** 
- Penguji I** : **Angga Natalia M.IP** 
- Penguji II** : **Abdul Qohar, M.Si** 
- Penguji III** : **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**

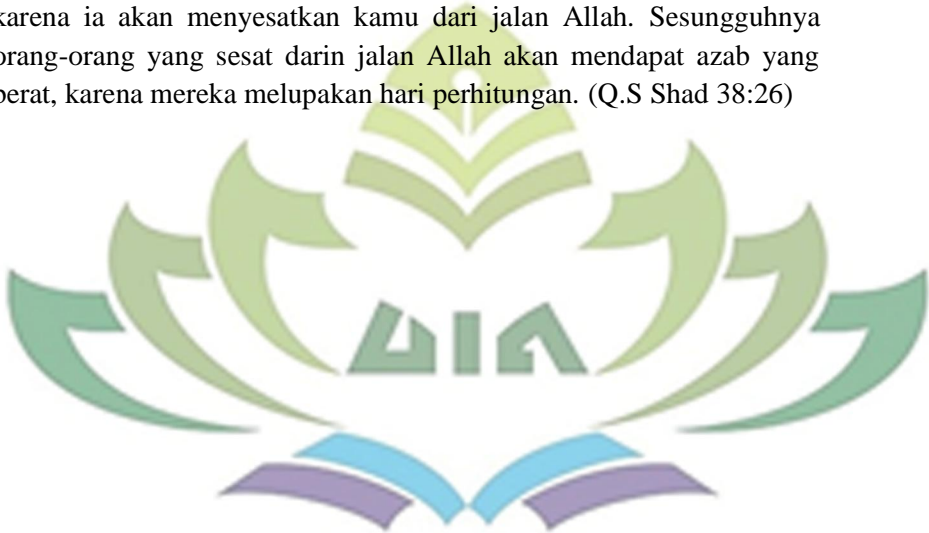

Dr. Ahmad Isnaeni, M.A
NIP. 197403302000031001



MOTTO

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Shad 38:26)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-nya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta dan kasih , perhatian, dan dengan ikhlas memanjatkan doa serta memberikan motivasi selama penulis menuntut ilmu.

1. Terimakasih kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan semuanya dengan lancar.
2. Terimakasih kepada mama yang sangat saya sayangi dan cintai Mama Ernilawati malaikat yang Allah berikan kepada saya, malaikat yang berperan menjadi ibu sekaligus ayah untuk saya, seseorang yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan support materil maupun materi yang telah banyak terkuras keringat hanya untuk melihat anaknya menyeledaikan pendidikan S1 nya dan kelak menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat, serta menjadi tempat pulang paling ternyaman yang selalu sigap melayani dan melindungi anak-anaknya.
3. Terimakasih kepada abangku tersayang Reynaldy Erwantara, satu satu nya abang yang selalu mensupport adiknya untuk tetap melanjutkan pendidikan dan selalu mensupport materi yang cukup untuk saya. Seseorang yang selalu memotivasi saya untuk cepat lulus dan menjadi sukses.

RIWAYAT HIDUP

Penulia Skripsi bernama lengkap Virginda Erwantiara merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari bapak Iwan Taruna dan Ibu Ernilawati lahir di Gedongtataan, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2001.

Pendidikan yang penulis tempuh mulai dari pada tahun 2007 penulis menyelesaikan TK Pertiwi di Gedongtataan, dilanjutkan pada 2008 penulis mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Gedongtataan dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya di menengah pertama di SMPN 1 Gedongtataan dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di pendidikan menengah atas di SMAN 1 Gedongtataan dan lulus pada tahun 2019.

Puji syukur Alhamdulillah penulis melanjutkan kembali mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 tercatat sebagai salah satu mahasiswa di fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Jurusan Pemikiran Politik Islam dan diselesaikan pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Virginda Erwantiara
NPM: 1931040099

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb

Alhamdulillahirabil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat rahmat serta hidayahnya serta karunianya yang telah diberikan kepada saya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ **Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar S1 Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari pihak lain berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, informasi dan pengarahan oleh penulis. Oleh karena itu , pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa hormat dan berterimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. H Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
4. Bapak Abdul Qohar M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan saran kritik serta mengarahkan dan memotivasi dalam penyusunan skripsi dan agar selalu bimbingan secepatnya.
5. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku pembimbinga akademik dan pembimbing II yang banyak memberikan kritis, arahan dalam penulisan skripsi serta memberikan motivasi kepada saya agar selalu semangat untuk bimbingan.
6. Ibu Angga Natalia, M.IP selaku penguji Utama yang telah memberikan arahan dan kritikan dan saran dalam pembuatan skripsi saya dan mengarahkan untuk lebih baik lagi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
8. Seluruh staff dan kepegawaian Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran skripsi ini.
9. Seluruh kepengurusan DPRD Kabupaten Pesawaran yang sudah memberikan data, informasi, bantuan, arahan, bimbingan pengetahuan serta pengalaman terhadap skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Grizbaldi Bayhaqy Hutapea sebagai partner spesial saya, menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktu, dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
11. Terimakasih kepada kedua sahabat saya Rara dan Ummi yang sudah memberikan dukungan, pengalaman kebahagiaan, bantuan doa, dan teman untuk berkeluh kesah selama pengerjaan skripsi ini, serta dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman ku KUMBELL yang sudah selalu memberikan arahan dan support terbaik untuk pengerjaan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan, seangkatan, teman rumah dan seluruh teman teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
14. Terakhir untuk saya sendiri terimakasih telah berjuang bersama melawan semua ini. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa kita mampu dan bertahan, dan terimakasih telah menjadi diriku sendiri dengan versi terbaik yang kita miliki.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Penulis

Virginda Erwantiara

NPM : 1931040099

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Dan Sub Fokus	9
1. Fokus Penelitian	9
2. Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat penelitian	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian	13
a. Jenis Penelitian	13
b. Sifat Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Metode Pengumpulan Data	16
4. Metode Pengolahan Data	18
5. Analisis Data	20
I. Kerangka Teoritik	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Kinerja Wakil Rakyat Perempuan	23
1. Definisi kinerja	23
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja	25

3.	Indikator kinerja.....	30
4.	Legislatif	32
	Fungsi Legislasi	33
5.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35
6.	Partai politik.....	35
7.	Peran Partai Politi Dalam Affirmative.....	36
8.	Politik gender	37
B.	Kepentingan perempuan.....	39
1.	Keterwakilan perempuan dalam politik.....	39
2.	Kontruksi Sosial Perempuan Dalam Ranah Politik	39
3.	Partisipasi politik	40
4.	Model partisipasi Politik	42
5.	Partisipasi Politik Perempuan.....	43
6.	Hak politik perempuan	44
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		47
A.	Sejarah kabupaten pesawaran.....	47
B.	Kondisi Geografis Kabupaten Pesawaran	48
C.	Kondisi Demografis Kabupaten Pesawaran	51
D.	Visi Dan Misi Kabupaten Pesawaran	52
E.	Waktu Penelitian	53
F.	Daftar Nama-Nama Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran ..	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		55
	Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merspon Kepentingan Perempuan	55
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		63
A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN		67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kabupaten Pesawaran	50
Tabel 2. Kondisi Demografis Kabupaten Pesawaran.	51
Tabel 3. Waktu Penelitian.....	53
Tabel 4. Pimpinan Dewan.....	53
Tabel 5. Komposisi Anggota	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Kabupaten Pesawaran	47
Gambar 2.	Peta Pembagian Wilayah Kabupaten Pesawaran	49
Gambar 3	Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Erlinda Widiastuti, M.Pd anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran fraksi Golkar	77
Gambar 4	wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Erlinda Widiastuti, M.Pd anggota komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran fraksi Golkar	77
Gambar 5.	Dokumentasu Kegiatan ibu Dra.Hj. Erlind Widiastuti,M.Pd.....	78
Gambar 6.	Kegiatan Reses ii , Ibu Dra.Hj. linda widiastuti,M.Pd ...	78
Gambar 7	wawancara dengan ibu evita Sahara, S.Kom	79
Gambar 8.	Kegiatan besama Ibu ibudesas Karang Anyar, bersama ibu Evita Sahara, S.Kom.....	79
Gambar 9	wawancara dengan Ibu evi susina,S.H.....	80
Gambar 10	Kegiatan Pira Kabupaten Pesawaran bersama Ibu evi susina,S.H.....	80
Gambar 11	Kegiatan bersama ibu KWT	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah, karena pada dasarnya judul ini untuk memberikan gambaran keseluruhan dari isi proposal skripsi. Judul proposal skripsi penulis adalah: **Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan (studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran)**. agar mempermudah pemahaman makna dari judul proposal ini, penulisnakan menguraikan beberapa isitilah dalam judul proposal skripsi tersebut .

Kinerja Wakil Rakyat Perempuan. Adalah cara atau tindakan yang dilakukan oleh seorang wakil rakyat perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Kinerja ini harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Kinerja yang dilakukan wakil rakyat perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota legislatif atau wakil rakyat dalam parlemen meliputi kemampuan dalam membuat dan mengusulkan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat. Kinerja wakil rakyat perempuan juga harus mencerminkan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan.

Pada masa reformasi, upaya peningkatan keterwakilan perempuan di bidang politik semakin berkembang, hal ini tidak terlepas dari adanya transisi formasi dari negara otoriter menjadi negara demokrasi. Hal ini kemudian mendorong gerakan perempuan untuk berusaha melibatkan diri dalam pemerintahan, dengan masuk ke dalam politik formal seperti parlemen, yang

kemudian adanya tuntutan keterwakilan perempuan minimal 30% di parlemen¹. Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih maju lagi dalam *affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut. DPRD sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan.

Kepentingan Perempuan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah menyatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa, tujuan dari pengarusutamaan gender adalah mewujudkan

¹ Maxine Molyneux dan Shara Razavi, “Gender Justice, Development, and Rights, United Nation Research Institute for Sosial Development, Democracy, Governance, and Human Rights,” *Programme Paper*, 10 (2013), 6.

kesetaraan dan keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan diberbagai bidang kehidupan. Jika dikaitkan dengan keterwakilan perempuan, bagaimana perempuan yang telah duduk di lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif khususnya ditingkat daerah. Masih banyak hak-hak perempuan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD. Perempuan akan tampil dengan maksimal menunjukkan potensi yang mereka miliki apabila mereka mampu mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dengan bantuan dan dukungan orang-orang terdekat, terlebih jika masalah-masalah tersebut mendapat perhatian khusus oleh para anggota legislatif perempuan, karena mereka yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan perempuan itu sendiri.

Masuknya perempuan kedalam lembaga legislatif merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik. Upaya menciptakan kesetaraan tersebut ditempuh melalui berbagai cara, dimana salah satunya adalah mengikutsertakan perempuan kedalam lembaga legislatif. Upaya ini bahkan dituangkan dalam bentuk kebijakan politik yang lebih riil, agar partisipasi politik perempuan dalam politik praktis semakin lebih tinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Tertib bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan bersama-sama dengan

kepala daerah dalam menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan daerah. Kemudian fungsi anggaran dilaksanakan dalam bentuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan Bupati²

Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas APBD dan pelaksanaan peraturan daerah serta perundang-undangan lainnya. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Lampung. DPRD Kabupaten Pesawaran memiliki 45 anggota yang tersebar di 11 partai politik.

Dengan demikian, maksud dari penelitian ini adalah, hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat daerah perempuan yang berada di Kabupaten Pesawaran, dalam memperjuangkan hak-hak atau kepentingan perempuan.

B. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Lampung, dalam melaksanakan pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan ini masih belum optimal, bisa dilihat dari data yang diolah dari nomor urut calon anggota legislatif yang terpilih itu kebanyakan terletak pada nomor urut 1 (satu) yang dominan merupakan laki-laki. Dan jumlah keterwakilan anggota DPRD perempuan dikabupaten pesawaran berjumlah 11 anggota dari keseluruhan anggota yang berjumlah 45 anggota, Hal ini tentunya berpengaruh juga pada kinerja tersebut dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada perempuan, seperti misalnya kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti KDRT maupun pelecehan. Tahun 2017 sampai dengan 2018 tercatat 68 kasus yang menimpa anak perempuan. 68 kasus dengan uraian tujuh anak mengalami tindak kekerasan fisik, empat anak alami tindak kekerasan psikis, dua penelantaran, lima anak berhadapan dengan hukum dan 61 anak

² https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pesawaran. (diakses 29 oktober 2022)

alami kekerasan seksual. Tahun 2021, terdapat 11 kasus kekerasan pada anak perempuan, dan tahun 2022 terdapat 16 kasus kekerasan seksual terhadap anak selama bulan Januari hingga Juli. Sedangkan untuk korban KDRT sendiri, terdapat 75 kasus sepanjang tahun 2022. Angka ini diduga masih lebih tinggi, karena ada banyak korban yang enggan melapor dikarenakan takut atau merasa malu³

Keberadaan wakil rakyat perempuan adalah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain agar hak-hak perempuan diperhatikan terutama hak perempuan dalam bidang politik sebagai warganegara yang juga punya hak yang sama dengan kaum pria. Isu pemberdayaan perempuan menjadi garis besar landasan pikir tentang keterwakilan perempuan dalam politik, juga agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang disusun memiliki sudut pandang gender, dan tentunya ini menjadi sebuah harapan yang menjanjikan bagi suatu perjuangan yang cukup panjang.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertera pada Pasal 55 adalah, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Secara spesifik undang-undang tersebut menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten dan kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dengan adanya peraturan tersebut mendorong sejumlah partai menyusun langkahlangkah strategi dalam menghimpun para perempuan untuk ikut terlibat dalam politik. Sejumlah partai baru yang ikut serta dalam pemilu 2014 menekankan hal keterwakilan perempuan sebagai prioritas utama partai, bahwa mereka betul-betul memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

³ “Angka Kekerasan di Kabupaten Pesawaran”, <https://kupastuntas.co/2022/08/18/ada-16-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-pesawaran-pada-januari-juli-2022>.

Selain pemenuhan kuota 30% alasan lainnya adalah keragaman perspektif: Perempuan memiliki perspektif yang berbeda dari laki-laki dan ini penting untuk membuat keputusan yang baik dan adil, Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik: Jika perempuan diwakili dengan baik di parlemen, ini akan mendorong lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, pembangunan yang inklusif: Perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam kebijakan dan program pembangunan. Dengan keterwakilan yang lebih baik, perempuan akan lebih terwakili dalam proses pembuatan kebijakan dan program pembangunan, peningkatan kualitas keputusan: Dengan keterwakilan yang lebih baik, perempuan akan dapat memberikan masukan yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih baik yang akan meningkatkan kualitas kebijakan dan program pembangunan, peningkatan kualitas demokrasi: Keterwakilan yang lebih baik akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat kedudukan perempuan dalam masyarakat.

Islam tidak membedakan eksistensi antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, khalifah, dan perjanjian primordial dengan Allah. Di samping itu, Islam juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja dan meraih prestasi yang setinggi-tingginya pada bidang-bidang yang dibenarkan Islam, melainkan semua manusia diberikan kesempatan dan hak yang sama sehingga antara laki-laki dan perempuan berkompetisi secara sehat, tanpa mengabaikan kodrat mereka masing-masing⁴.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

⁴ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, dan Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam, alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer* (Restu Ilahi, 2005), 77.

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)⁵

Ayat ini sesungguhnya menegaskan kepada kita, bahwa Islam menganggap laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah. Baik Laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan oleh Allah, tidak ada yang lebih baik di antara yang lain kecuali hanya karena ketakwaannya kepada Allah⁶.

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan tugas antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya mereka sama sebagai wakil rakyat namun diharapkan dengan adanya anggota perempuan di DPRD dapat memberikan sumbangsih pemikiran masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain dalam hal itu anggota perempuan juga dapat menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga aspirasi yang diakomodasi dalam program kerja di DPRD seimbang Seperti halnya aspirasi persoalan lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan di dalam menjalankan fungsinya seperti halnya Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai anggota DPRD.

Adanya keterwakilan perempuan yang muncul selaku aktor dalam lembaga legislatif ataupun pengambil keputusan sebab perempuan dianggap mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimana hanya perempuan yang dapat menguasai dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain meliputi kesehatan reproduksi, permasalahan kesejahteraan keluarga semacam harga sembilan bahan pokok yang terjangkau, permasalahan pembelajaran anak, kebutuhan manusia lanjut usia, isu-isu kekerasan seksual, dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akan tetapi adanya keterwakilan perempuan di DPRD merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri. Minimnya keterwakilan perempuan dalam lembaga

⁵ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*,” hal. 578.

⁶ Ali Akbar, “*Merawat Cinta Kasih*,” in *Pustaka Antara* (Jakarta, 1978), hal. 34.

politik secara tidak langsung berhubungan dengan faktor-faktor ideologis serta psikologis yang fundamental. Hal ini diperlihatkan dengan adanya kenyataan bahwa perempuan yang aktif bergerak dilembaga politik tidak bisa memegang kedudukan selaku pimpinan sebab mereka memandang partai politik sebagai arena yang dikuasai laki-laki. Sidang-sidang yang sarat konflik serta sesekali diwarnai kekerasan fisik, dan pergulatan tanpa henti untuk memperebutkan kedudukan dan kekuasaan merupakan beberapa hal yang mengecilkan nyali mereka. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari praktik politik semacam itu. Hal ini dikarenakan struktur politik di Indonesia yang mendominasi adalah kaum laki-laki. Disamping itu minimnya transparansi dalam pemilihan pemimpin partai politik sangat membatasi peluang kaum perempuan dalam upaya mereka memosisikan diri selaku kandidat yang pantas. Loyalitas individu, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi kumpulan penyakit yang mengikis sistem politik saat ini. Belum adanya partai politik yang dapat memasukkan agenda perempuan juga menjadi salah satu hambatan besar.

Anggota legislatif perempuan harus dapat menjalankan setiap fungsi dan haknya. Setiap anggota legislatif perempuan berhak untuk menggunakan setiap hak khususnya menyangkut fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan masih kurang memanfaatkan perannya sebagai perwakilan kaum perempuan yang ada diranah politik⁷.

Menurut Farid Abdul Khaliq bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik ini, juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat, dimulai dari kewajiban menasihati,

⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010), 39.

selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau wewenang majelis permusyawaratan; memberhentikan penguasa atau menghancurkan pemerintahannya. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah yang melarang hal demikian.⁸

Berdasarkan pada hal hak diatas maka penulis tertarik dan berminat meneliti tentang “ **KINERJA WAKIL RAKYAT PEREMPUAN DALAM MERSPON KEPENTINGAN PEREMPUAN (STUDI DPRD KABUPATEN PESAWARAN)** ”

Agar peneliti lebih fokus dan terarah serta agar uraian tidak menyimpang dari masalah yang akan diteliti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman . Maka peneliti ini membahas tentang kinerja wakil rakyat perempuan khususnya anggota DPRD perempuan di kabupaten Pesawaran dalam merespon kepentingan perempuan dalam kesetaraan gender.

C. Fokus Dan Sub Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu . fokus penelitian juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang penelitian terhadap fokus masalah yang sedang diteliti . Adapun fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merspon Kepentingan Perempuan di DPRD Kabupaten Pesawaran. Fokus penelitian adalah pada fungsi dewan perwakilan rakyat yaitu, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan, yang kemudian dikaitkan dengan indikator kinerja menurut Mangkunegara yaitu akuntabilitas, efektifitas, dan responsivitas, dalam mendampingi

⁸Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy* ...,128.

kepentingan perempuan sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian adalah :

- A. Respon wakil rakyat perempuan terhadap permasalahan yang menimpa perempuan di wilayah konstituen
- B. Produktivitas wakil rakyat perempuan dalam mengatasi permasalahan yang menimpa perempuan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai objek penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja wakil rakyat perempuan Kabupaten Pesawaran dalam merespon kepentingan perempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kinerja wakil rakyat perempuan Kabupaten Pesawaran dalam merespon kepentingan perempuan

F. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang sistem politik, politik lokal dan juga yang berkaitan dengan kinerja perempuan dalam menjadi wakil rakyat daerah, serta mengetahui tentang kesetaraan gender dalam ranah politik.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana aktualisasi diri sebagai seorang mahasiswa untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang ada dan teori yang diperoleh selama peneliti mengikuti perkuliahan dengan membandingkan fakta di lapangan.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari pengumpulan hasil pertemuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku atau tulisan lain maka peneliti akan menyampaikan karya ilmiah atau skripsi yang serupa tentang kinerja wakil rakyat perempuan dalam merespon kepentingan perempuan (studi kasus anggota DPRD kabupaten Pesawaran)

Adapun salah satu karya ilmiah dimuat dalam skripsi ilmu pemerintahan oleh Mikha Juni Adellina Mendrofa universitas medan area pada tahun 2021, beliau mengangkat skripsi yang berjudul “ **Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan**” .fokus kajian dari skripsi tersebut adalah mengetahui kinerja anggota perempuan di DPRD provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Jurnal selanjutnya yaitu oleh Andrianus Jacobus dengan karya ilmiah pada tahun 2017 yang berjudul “**Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**”. Fokus kajian ilmiah tersebut berat berada pada memperjuangkan kepentingan perempuan dalam proses legislasi dan musyawarah rencana pembangunan perempuan di kabupaten kepulauan siau Tahulandang Biaro sebagai peran untuk membuat program yang memperjuangkan kaum.

Dan selanjutnya adalah karya ilmiah yang dimuat dalam skripsi ilmu politik oleh Rahmat Hidayat Universitas

Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020, beliau mengangkat skripsi yang berjudul **“Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Mendukung Kebijakan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Bulukumba”**. Fokus kajian dari skripsi tersebut berada pada penegakan kesetaraan gender anggota legislatif kabupaten.

Jurnal selanjutnya yaitu oleh Ahmad Rizal mahasiswa jurusan Ppkn universitas negeri Makasar pada tahun 2019, yang berjudul **“kinerja anggota legislatif perempuan (studi pada DPRD Kota Makasar)”**. Fokus kajian ilmiah tersebut pada upaya anggota legislatif perempuan di DPRD kota Makasar dalam merespon aspirasi masyarakat.

Selanjutnya jurnal dari Sukriyati,*dkk* jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari Pada Tahun 2020, yang berjudul **“Peran Politik Anggota Dprd Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Konawe Utara 2014-2019”**. Fokus kajian ilmiah tersebut untuk mengetahui regulasi-regulasi dan anggaran pendukung dalam membantu dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Selanjutnya jurnal yang dimuat oleh Thomy Ioda, *dkk*. Mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2019, yang berjudul **“Kinerja Dprd Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di Dprd Kabupaten Halahera Barat”**. Fokus kajian ilmiah tersebut terletak pada anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi.

jurnal selanjutnya dimuat oleh Vrenanda Bella Yozevi mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada tahun 2022, yang berjudul **“Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Periode 2019-2024 Di Provinsi Lampung”**, fokus penelitian ini terletak pada mengetahui jumlah keterwakilan perempuan provinsi Lampung yang sudah memenuhi afirmasi 30%.

Selanjutnya skripsi yang dimuat oleh Asti Latifah pada tahun 2011, yang berjudul **“Kinerja lembaga legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan Studi kasus DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2010”** fokus

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja para lembaga legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di parlemen dalam mengupayakan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dar kegiatan aspirasi rakyat.

Skripsi yang dimuat oleh Oktaviani Adhi Suciptaningsih pada tahun 2013, yang berjudul **“Partisipasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten Kendal”** fokus penelitian ini terletak bagaimana partisipasi perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal dan bagaimana peran perempuan dalam penentuan kebijakan di Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal.

Jurnal yang dimuat oleh Irwan Abdullah mahasiswa Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada pada tahun 2014, yang berjudul **“Politisasi Gender Dan Hak-Hak Perempuan Kendala Dalam Pencalonan Legislatif”** yang dimana fokus penelitian tersebut terletak pada kurangnya tindakan afirmatif yang dilakukan oleh pihak partai juga melemahkan posisi perempuan dalam politik. dan Proses demokratisasi yang terjadi masih belum memberi tempat yang strategis bagi perempuan.

Selanjutnya skripsi yang dimuat oleh Dian Pratiwi mahasiswa Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2016, yang berjudul **“Kinerja Anggota Perempuan DPRD Kota Semarang Tahun 2014-2015 Dalam Perspektif Feminisme”** fokus penelitian tersebut pada Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, dan faktor yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul “Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan (Studi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran)”, maka, jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Jenis

penelitian ini bertujuan untuk mengamati objek penelitian secara instensif tentang keadaan dilapangan sekarang serta korelasi antara lingkungan sosial, individu, masyarakat atau lembaga⁹.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif sangat tepat digunakan untuk metode penelitian yang melahirkan analisis, klasifikasi, data-data deskriptif sejumlah kata-kata tertulis atau lisan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan secara sistematis dan akurat mengenai Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam peneliti ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang detail dan mendalam tentang bagaimana Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Menurut Prastya Irawan, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan suatu hal seperti kondisi apa adanya yang ada di lapangan¹⁰.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat

⁹ Kholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

¹⁰ Prastya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakarta: Setiawan Pers, 1999), 60.

di muka¹¹. Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi atau data dengan cara membaca, mengutip dan menyusun berdasarkan data data yang di temukan dan di peroleh. Penelitian ini menggunakan Teknik Pengambilan Sampel *Purposive Sampling* , dalam memilih sekelompok subyek yang didasari atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹²Dalam penulisan penelitian ini data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya¹³. Sumber data primer adalah responden atau objek penelitiannya langsung, sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Dari penelitian ini, data primer yang di ambil adalah wawancara dengan anggota DPRD kabupaten Pesawaran yang menangani kasus tentang perempuan dan anak yaitu anggota DPRD kabupaten Pesawaran yaitu

1. Ketua komisi IV ibu Devita Sahara, S.kom fraksi PKB
2. Anggota komisi IV ibu Dra. Hj. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I fraksi Golkar dan selaku Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI)
3. Evi susina, S.H Wakil Ketua komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran Dan Ketua lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten pesawaran

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

¹² Handari Nawawi, *Metodelogi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995). 72.

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dapat juga dikatakan, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada atau diperoleh dari sumber internal maupun eksternal¹⁴. Dalam penelitian ini sumber data sekunder bisa diambil dari literature, bacaan, buku buku dan jurnal peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya catatan atau dokumentasi berupa, struktur organisasi, visi dan misi, tujuan, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan aktifitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Jika dilihat dari pengertian metode pengumpulan data menurut ahli metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya¹⁵

a. Wawancara

Metode Wawancara/Interview adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja¹⁶. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Anggota DPRD perempuan di Kabupaten Pesawaran yaitu ketua komisi IV ibu Devita

¹⁴ Hidayat,taufik “pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian” vol.1 (purwokerto,2019)

¹⁵ Dr Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (2013), 22.

¹⁶ Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan statistik* (Jakarta: Bumi aksara, 2004), 19.

Sahara fraksi PKB , anggota komisi IV ibu Dra. Hj. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I fraksi Golkar, wakil ketua komisi II ibu Evi Susina, S.H. fraksi Gerindra.

Wawancara dilakukan dengan membuat pertanyaan terstruktur yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya yang diajukan kepada Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan beberapa informan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan di Kabupaten Pesawaran.

b. Metode Observasi

Metode Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar¹⁷.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Pesawaran. Penulis melakukan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Penulis mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dan observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya dan dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati yaitu Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan

¹⁷ Syofian Siregar, "Statistik Deskriptif Untuk Penelitian. Edisi 3" (Jakarta: Raja Rajawali Pers, 2012), 20.

Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Pengamatan dilakukan dengan cara, penulis datang langsung ke Kantor DPRD Kecamatan Kabupaten Pesawaran untuk melihat bagaimana upaya wakil rakyat perempuan dalam merespon kepentingan perempuan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya¹⁸. Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai Kinerja Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan pendukung lainnya.

Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Rakyat Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan di Kabupaten Pesawaran.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) dikumpulkan melalui tahap diatas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan metode sebagai berikut:¹⁹

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*), yaitu melakukan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh

¹⁸ Husein Husman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 6.

¹⁹*Ibid*, 43.

terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis apakah sudah cukup, lengkap dan benar serta telah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menjelaskan mengenai sumber data (Buku-buku, pendapat ahli, jurnal penelitian terdahulu, Al-Quran dan Hadis serta UUD 1945 dan referensi lainnya).
- c. Rekonstruksi (*Reconstructing*), yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data (*Sistematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
- e. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk kemudian diperoleh kesimpulan mengenai hasil yang ditemukan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi materi yang lainnya yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.²⁰ Menurut Mileas dan Hubernman sebagaimana dikutip oleh Emzir mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

²⁰ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data) (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 85.

a. Reduksi Data

Emzir mengemukakan, Reduksi data dapat diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data ini, penelitian dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap mana yang hendak dipilih dan data mana hendak dibuang. Mana merupakan ringkasan, dan cerita-cerita yang sedang berkembang.

b. Display Data

Selepas melakukan reduksi data, tahap berikutnya yaitu melakukan display data. dengan melakukan display data maka mempermudah mengerti yang terjadi dan merencanakan kegiatan berikutnya berdasarkan pada yang sudah dipahami. dalam penelitian kualitatif, display data bisa dilaksanakan dalam bentuk uraian singkat., bagan, relasi antar kategori , Flowchart dan sejenisnya. Dalam tahap ini, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar penulis mudah memahami fenomena yang terjadi. pada tahap ini, penulis berupaya menyajikan data yang relevan sehingga informasi yang diperoleh Meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan Umum di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

c. Kesimpulan Dan Vertifikasi Data

Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan/vertifikasi dari suatu data. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang

digunakan, kecakapan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang penelitian menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.²¹

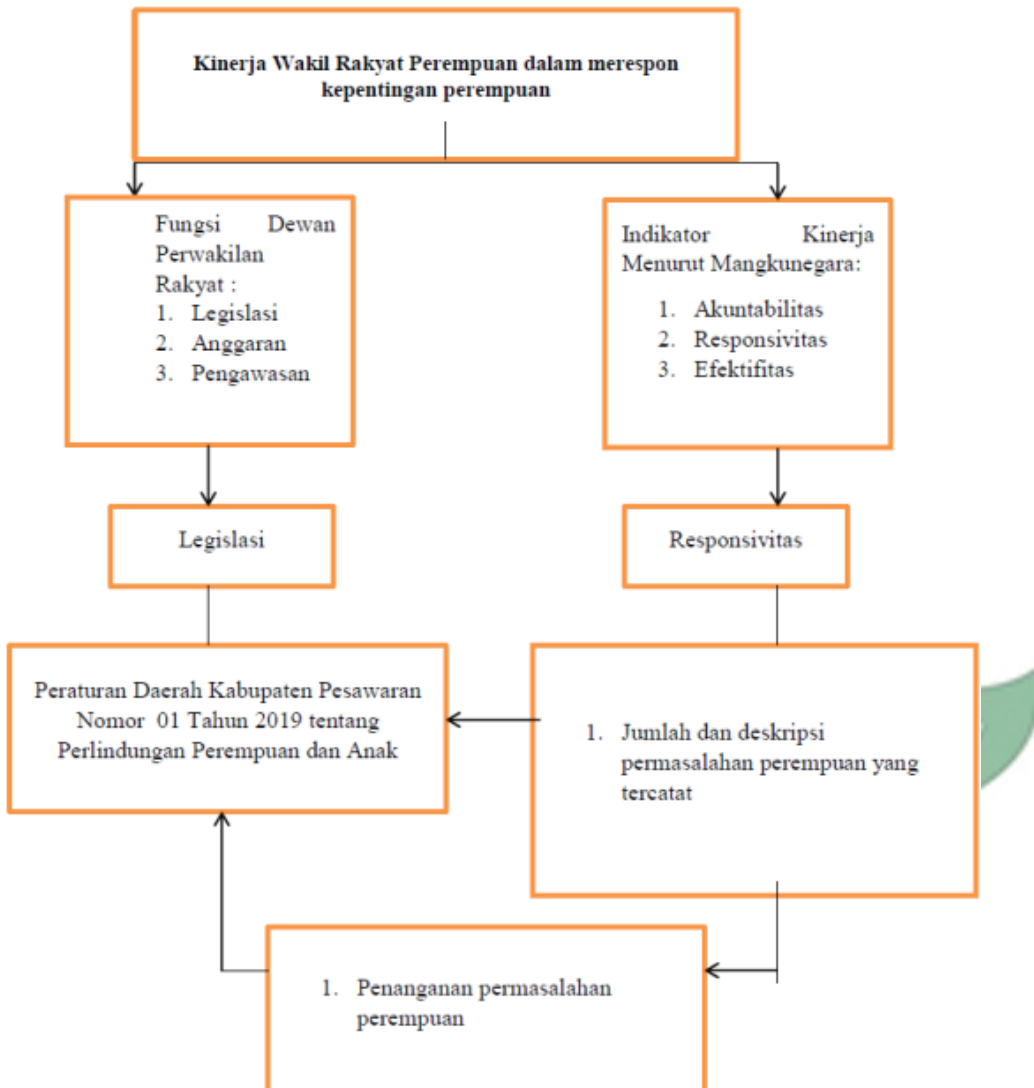
6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi *uji kredibilitas data*, *uji transferability*, *uji dependability*, dan *uji confirmability*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. *Uji kredibilitas data* dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 triangulasi dalam keabsahan data., yaitu triangulasi sumber adalah Triangulasi ini dilaksanakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber, triangulasi teknik adalah Triangulasi ini dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi. Contohnya adalah data didapat dengan cara wawancara yang selanjutnya diuji dengan dokumentasi, observasi. dan triangulasi waktu adalah Pada triangulasi ini, peneliti akan mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, waktu sehabis makan, pagi, siang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber akan dilakukan oleh Anggota DPRD perempuan di Kabupaten Pesawaran yaitu ketua komisi IV ibu Devita Sahara fraksi PKB, anggota komisi IV ibu Dra. Hj. Erlinda Widiastuti, M.Pd.I fraksi Golkar, wakil ketua komisi II ibu Evi Susina, S.H. fraksi Gerindra.

²¹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)...., 195.

I. Kerangka Teoritik



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kinerja Wakil Rakyat Perempuan

1. Definisi kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi²², kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif²³.

kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Kinerja pada sektor publik meliputi kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja organisasi. Dimana untuk dapat mencapai tujuan organisasi diperlukan keseimbangan antara kinerja individu, kelompok dan organisasi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa esensi dari kinerja organisasi adalah gambaran mengenai hasil kerja dari kegiatan kerjasama di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan²⁴. Dalam penelitian ini kinerja organisasi yang dimaksud adalah tingkat

²³ pasolong abani, "teori administrasi publik," in *alfabata* (bandung, 2010), hal. 175.

²⁴ muhammad mahsun, *pengukuran kinerja sektor publik* (malang, 2018).

pencapaian ataupun hasil kerja dalam merespon kepentingan perempuan di Kabupaten Pesawaran.

terdapat empat elemen pokok pengukuran kinerja, antara lain:

a) Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi, Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran

b) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja, Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang bersifat hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

c) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai sasaran atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

d) Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi²⁵.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

a. Efektifitas dan efisiensi Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien²⁶

b. Otoritas (wewenang) Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya . Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.²⁷

c. Disiplin Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. d. Inisiatif Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.²⁸

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain :

²⁵ Mahsun, Muhamad. 2006. Pengukuran kinerja sektor publik. Malang. BPFE-X²⁶

²⁶ Prawirosentono, 1999. Pengukuran kinerja sektor publik. Malang

²⁷ Prawirosentono, 1999. Pengukuran kinerja sektor publik. Malang

²⁸ Prawirosentono, 1999. Pengukuran kinerja sektor publik. Malang

1. Faktor personal Yakni meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki semua individu.
2. Faktor kepemimpinan Yakni meliputi kualitas pemimpin dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan.
3. Faktor tim Yakni meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap semua anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem Meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual Meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.²⁹

Sedangkan kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh dua faktor yakni:

Faktor internal yang terdiri dari:

- a. Tujuan organisasi, yakni apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diproduksi oleh suatu organisasi.
- b. Struktur organisasi, sebagai hasil design antara fungsi yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada
- c. Sumber daya manusia, yakni kualitas dan pengelola anggota organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.

²⁹ Mahmudi 2010. Management kinerja sector publik

d. Budaya organisasi, yakni gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.³⁰

Faktor eksternal yang terdiri dari:

a. Faktor politik, hal yang berhubungan dengan keseimbangan kekuatan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi dalam berkarya secara maksimal.

b. Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem ekonomi yang besar.

c. Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.

kinerja organisasi memang tidak semata-mata dipengaruhi oleh kinerja individual atau kinerja tim saja, namun dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas dan kompleks, misalnya faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Faktor lingkungan meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum yang didalamnya organisasi beroperasi. Selain faktor lingkungan eksternal, faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kepemimpinan, struktur organisasi, strategi pilihan, dukungan teknologi, kultur organisasi dan proses organisasi.³¹

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi yaitu :

1. Kemampuan, Pada dasarnya kemampuan menurut Robins adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan

³⁰ Tangkilisan 2007, management publik hal 27

³¹ Mahmudi 2010. Management kinerja sector public hal 22

berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi: (1) kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan. Kemampuan dalam suatu bidang hanya dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki bakat dan intelegensi (kecerdasan) yang mencukupi.³²

2. Kemauan, Kemauan atau motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor : (a) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap pegawai menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, lampu yang terang, ventilasi udara yang nyaman, sejuk, bebas dari gangguan suara berisik dan sebaiknya ada musik. (b) pengaruh lingkungan sosial yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja, tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh orang lain, pegawai lebih berbahagia apabila dapat menerima dan membantu pegawai lain³³

3. Energi ,Energi menurut adalah pemercik api yang menyalahkan jiwa. Tanpa adanya energi psikis dan fisik yang mencukupi, perbuatan kreatif pegawai terhambat³⁴. pentingnya energy sebagai unsur terpenting keberhasilan intelektual dan kreatif. Lewatnya yang mendalam menunjukkan bahwa orang-orang menjadi sukses dalam melakukan tugas jika mampu mencapai suatu keadaan yang di sebutnya Flow, atau mengalir³⁵.

4. Teknologi adalah tindakan sisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi Teknologi dapat dikatakan sebagai “tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa

³² pasolong (2016:186)

³³ Robins dalam buku (pasolong 2016:187)

³⁴ Jordan E. Ayan (2016:187)

³⁵ Mihaly Csikszentmihalyi dalam buku parsolong hal 188

bantuan alat mekanikal, untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.³⁶

5. Kompensasi, Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Jika pegawai mendapat kompensasi setimpal dengan hasil kerjanya, maka pegawai berfikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan tambahan diluar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir

6. Kejelasan Tujuan, Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien atau kurang efektif. Hal ini sejalan dengan seorang pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriterianya³⁷.

7. Keamanan, Keamanan pekerjaan adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat. Oleh sebab itu, tidak cukup bagi seseorang dengan hanya terpenuhinya kebutuhan fisik mereka dari hari ke hari, tetapi mereka ingin memastikan bahwa kebutuhan mereka harus terpenuhi di masa yang akan datang. Seseorang yang merasa aman dalam melakukan pekerjaan berpengaruh terhadap kinerjanya.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti faktor personal, kepemimpinan, kerja tim, sistem, struktur organisasi, strategi pilihan, kultur organisasi, dukungan teknologi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor situasional/ lingkungan (ekonomi, sosial, politik, keamanan

³⁶ Gifson dkk dalam buku pasolong (2016:188)

³⁷ Widodo (2006:81)

³⁸ George Strauss & Leonard Sayles dalam buku pasolong (2016:189)

dan hukum). Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi tergantung pada jenis, karakteristik dan tujuan pembentukan organisasi itu sendiri

3. Indikator kinerja

Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan atau kinerja seorang pegawai harus memiliki pedoman dan dasar-dasar penilaian. Pedoman dan dasar-dasar penilaian tersebut dapat dibedakan dalam aspek-aspek penilaian. Menurut Soeprianto aspek-aspek yang perlu dinilai untuk level pimpinan atau manager dalam suatu organisasi ialah: Tanggungjawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa atau inisiatif dan kepemimpinan. Untuk dapat mengetahui kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk dapat menilai kinerja tersebut. Sehingga ada indikator atau tolok ukur atau ukuran yang jelas dan tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi publik tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi dan melindungi kepentingan publik maka kinerja organisasi publik dikatakan berhasil ketika mampu mewujudkan misi dan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Akuntabilitas maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Sehingga karena dalam penelitian ini studi kasus DPRD jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD salah satunya juga dinilai dari akuntabilitas sehingga untuk melihat seberapa besar pelaksanaan kegiatan dan tugas dari fungsi legislasi yang berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan pihak eksekutif. Sehingga dalam akuntabilitas ini DPRD di uji dimana ia harus merancang dan

mementukan arah tujuan aktifitas pemerintahan khususnya dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan perempuan yang sampai saat ini masih banyak kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi serta anggota dewan yang terhormat dapat mempertanggung jawabkannya ke publik³⁹.

b. Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-programn pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari pendapat-pendapat diatas maka diambil kesimpulan bahwa tolak ukur dari kinerja organisasi publik ialah responsivitas dimana dalam hal ini sejauh mana tingkat kepekaan organisasi publik ini untuk mau mendengarkan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Tingkat responsivitas yang akan diteliti ialah kemampuan anggota DPRD perempuan dalam mengenali kebutuhan kaum perempuan yang belum terpenuhi dan responsivitas anggota DPRD perempuan dalam memberantas ketertindasan kaum perempuan serta mengengkat derajat kaum perempuan sehingga tercapainya kesetaraan gender yang hingga kini nampak sekali ketimpangan anantara laki-laki dan perempuan. kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakatlah maka suatu organisasi mampu untuk mencapai keberlanjutan organisasi itu sendiri. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan sendirinya menunjukkan kinerja yang buruk dan menunjukkan kegagalan organisasi.⁴⁰

c. efektivitas, adalah kemampuan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dengan melihat seberapa baik hasil yang dicapai oleh organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang telah ditetapkan haruslah jelas, terukur, dan terarah untuk dapat memudahkan dalam mengukur efektivitas. efektivitas bukan hanya

³⁹ Dwiyanto (pasolong 2006:50)

⁴⁰ Ibid

ditentukan oleh hasil yang dicapai, namun juga oleh bagaimana proses pencapaian tujuan dilakukan. Proses yang efektif akan membantu meningkatkan efektivitas organisasi atau individu dalam mencapai tujuan. Selain itu, efektivitas dapat diukur dengan mengukur seberapa besar dampak atau manfaat yang dihasilkan dari pencapaian tujuan. Dampak yang dihasilkan haruslah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi atau individu serta lingkungan sekitar.⁴¹

4. Legislatif

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “*legislate*” atau membuat undang-undang yang anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum. Menurut Rousseau tentang *Volonte Generalr* atau *General Will* yang menyatakan bahwa “Rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu kemauan”. Menurut Meriam Budiardjo, menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang dibuat mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum⁴² Susunan ke anggotaan legislatif pada dasarnya menurut Meriam Budiardjo, adalah beraneka ragam yaitu ada yang jumlahnya mencapai 1300 anggota seperti DPR di Uni soviet “Rusia”, DPR di Indonesia berjumlah 560 orang dan ada yang kecil seperti DPR Pakistan yaitu senyok 150 anggota. Sistem penentuan anggota DPR beranekaragam sifatnya yaitu:

1. Turun temurun (sebagian majelis tinggi inggris)
2. Ditunjuk (senat kanada)

⁴¹ Mangkunegara, 2009.

⁴² Miriam Budiardjo, *dasar dasar ilmu politik* (Jakarta, 2008).

3. Dipilih, baik secara langsung baik pun secara tidak langsung Dewasa ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation).

Kehadiran konsep ini di pelopori oleh Negara-negara demokrasi yang menganut Ideologi politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui mengenai keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. asumsi ini mendorong lahirnya system perwakilan dalam kehidupan rakyat suatu Negara yang perwujudannya dilakukan melalui partai politik dalam pemilihan umum⁴³. Namun demikian system perwakilan ini secara umum dapat dibagi 2 yaitu :

1. Sistem perwakilan langsung, yaitu system pengangkatan wakil rakyat secara langsung melalui pemilu oleh rakyat perantara DPR/MPR.
2. Sistem perwakilan tidak langsung, yaitu system pemilihan wakil rakyat yang memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk menentukan calon legislatif yang akan diwakili dan juga mengangkat anggotaanggota DPR/MPR melalui pengangkatan dari unsure atau golongan oleh pemerintah⁴⁴

Fungsi Legislasi

1. fungsi legislasi, dimana DPR memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang bersama Presiden. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang: Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
 - a. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
 - b. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

⁴³ ibid

⁴⁴ ibid

c. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD d. Menetapkan UU bersama dengan Presiden e. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UUMengawasi pelaksanaan Undang-undang

2. Fungsi Anggaran, Fungsi yang kedua yaitu fungsi anggaran, dimana DPR membahas dan memberikan sebuah persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

a. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

b. memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama

c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

3. Fungsi Pengawasan Fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan, DPR melaksanakan sebuah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan ABN.Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Suatu Negara yang Menyatakan demokratis harus mempunyai lembaga ini dalam struktur ketatanegaraanya karena selain berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat, parlemen juga berfungsi sebagai fungsi pengawasan bagi lembaga lainnya terutama eksekutif. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat.

6. Partai politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya⁴⁵ Partai politik adalah kekuatan politik (organisasi kekuatan) yang berfungsi untuk membela dan memperjuangkan nilai dan kepentingan rakyat, khususnya anggota dan simpatisannya, melalui pengaruh atau kekuasaan atas otoritas negara, khususnya pemerintah. Secara universal dan demokratik, peran utamanya adalah memegang kekuasaan negara, apabila mereka berhasil memperoleh suara mayoritas dalam pemilu. Fungsi lainnya adalah menyiapkan kader-kader pemimpin, pendidikan politik bagi rakyat, sarana partisipasi politik dan komunikasi politik dan banyak lagi yang lain.

Partai politik memegang peran penting untuk mengubah relasi gender ke arah kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pola rekrutmen yang ada harus dilandasi oleh kepekaan dan kesadaran gender⁴⁶. Makna parpol sebagai

⁴⁵ Budiarjo, Mariam 2008 hal 404

⁴⁶ Soeptijpto, Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta Penerbit Buku Kompas hal 32

institusi politik dan pilar demokrasi direduksi hanya seperti perusahaan korporasi yang mengejar insentif ekonomi sebesar-besarnya, diperoleh lewat jabatan politik yang diperebutkan melalui arena pemilu dan pilkada. Ketua partai politik saat ini berperan lebih seperti CEO yang mengejar tujuan jangka pendek (pilkada, pemilu). Demi meraih tujuan politik tersebut proses politik dan institusionalisasi berjenjang tidak lagi berlaku, digantikan oleh peran lembaga survei. Makna seperti ini jauh dari pengertian organisasi kepartaian yang dibentuk dengan visi dan ideologi bersama, serta gagasan bahwa partai adalah institusi yang menjalankan fungsi penting seperti kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik ataupun agregasi kepentingan. Kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, vote getter yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan aspirasinya. Mekanisme rekrutmen instan yang bernuansa nepotisme, gizi, serta popularitas versi survei juga terjadi pada beberapa perempuan yang bisa memotong jalur tanpa mengikuti proses dan tiba-tiba muncul menjadi kandidat legislatif atau calon pilkada⁴⁷.

7. Peran Partai Politik Dalam Affirmative

Action Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik telah pula diberi kepercayaan dalam affirmative action, yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan mendapat perwakilan sebesar 30%. Munculnya affirmative action merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik, partai politik merupakan tempat yang tepat, karena di dalam partai politik kaum

⁴⁷ Soeptjipto, Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta Penerbit Buku Kompas hal 4-6

perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik adalah wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi, dan menyiapkan kaderkader pemimpin bangsa. Banyaknya partai politik yang muncul di era reformasi merupakan peluang besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi di sektor ini. Sebab adanya partisipasi perempuan dalam partai politik dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita, bahkan untuk meningkatkan kepercayaan public atas hasil politik⁴⁸. Perempuan dan politik merupakan rangkaian kata yang sering kali dijadikan slogan oleh partai politik menjelang pemilu. Slogan tersebut dimaksudkan sebagai kampanye agar perempuan tertarik menyumbangkan suaranya pada partai politik. Namun hal tersebut sepertinya hanya sebatas slogan, karena saat pemilu berakhir partai politik lupa akan janjinya.

8. Politik gender

Konsep kesetaraan gender dengan penafsiran berbeda-beda kerap menimbulkan respon yang tidak proporsional. Semoga artikel ini dapat menjadi salah satu referensi untuk menyamakan persepsi tentang pengertian gender. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah —gender berarti jenis kelamin. Perubahan ciri dan sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat yang lain, juga perubahan tersebut bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah, baik itu waktu maupun kelas.

Pengertian gender yang lebih kongkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Umar bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat

⁴⁸ Sastryani; 2009: 174-176).

yang didasarkan pada rekayasa sosial dua definisi dia atas menyimpulkan gender bisa dikatakan sebagai perubahan yang mendasari dari waktu ke waktu bersifat kultural sebagai perbedaan dalam menjalankan perannya masing-masing. Istilah gender berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses social dan cultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing⁴⁹. dari dua definisi diatas menyetujui gender dikatakan kodrat tuhan yang memiliki biologis dengan membentuk perubahan sosial yang secara teratur. Dari kesimpulan diatas bahwa kesetaraan gender hak dari semua orang baik dari laki-laki atau perempuan yang harus di samakan ratakan karna kodrat anugrah dari tuhan yang sudah memiliki biologis sehingga sifat sosial terhadap lingkungan sekitar

Gender adalah konstruksi sosial dalam suatu negara yang di pengaruhi oleh kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, agama maupun lingkungan etnis. Gender bukan jenis kelamin, namun gender dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Dari kondisi yang ada ssekarang gender menimbulkan berbagai penafsiran dan makna yang belum sesungguhnya memaknai gender itu sendiri. Bila diamati masih terjadi kesalahpahaman mengenai perhatian gender vdalam keterkaitan dengan upaya emansipasi kaum perempuan. Prinsip dalam kesetaran gender harus didefenisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun bidang pembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Persoalan perempuan terkait erat dengan masalah

⁴⁹ Zainuddin, 2006

kesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada kesepakatan tentang makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

B. Kepentingan perempuan

1. Keterwakilan perempuan dalam politik

Pada UUD 1945 pasal 28 mengatakan pengakuan Hak Asasi bagi setiap warga negaranya adalah sama. Setiap warganya baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak dalam kehidupan bangsa dan bernegara tanpa adanya batasan. Sehingga hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak dalam perpolitikan tersebut. Hak-hak perpolitikan perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi PBB yang menjelaskan beberapa hal :

1. Perempuan berhak dalam memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama bagi laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang telah dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.
3. Perempuan berhak memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi.

2. Konstruksi Sosial Perempuan Dalam Ranah Politik

Konstruksi sosial atas Realitas (social construction of Reality) yang didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di antara individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi

kontemporer, di cetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Lukman. Kontruksi tersebut telah membuat kaum perempuan seperti kelompok yang terpinggirkan, bahwa perempuan hanya pantas berada di ranah dosmetik dan tidak layak terjun ke ranah politik terutama bidang politik. Hal ini menyebabkan terkekangnya perempuan sehingga mereka tidak dapat berkembang dan berkiprah seluas-luasnya dalam ruang public. Kontruksi ini memandang ketidak mampuan perempuan bersaing dengan laki-laki, sehingga untuk menjalankan peran di ruang public dianggap tidak mampu. Hal ini mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan.

3. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Akumulasi dari sub-sub yang saling interpendensi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka melaksanakan dan menyukseskan kerjasama sehingga dapat mencapai hasil yang besar dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, tentu termasuk dengan sistem politik yang memiliki fungsi yang perlu dilaksanakan meskipun fungsi ini tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. politik merupakan Kegiatan warga Negara biasa di bagi dua : mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Dari defenisi ini dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik : 1 menyangkut kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi.

Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif. 2 Kegiatan politik warga Negara biasa atau orang perorangan sebagai warga Negara biasa yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung (perantara) 3 Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintahan baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan bahkan penolakan juga terhadap keberadaan figur para pelaku politik dan pemerintah 4 Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya mempengaruhi pemerintah tanpa peduli efek yang akan timbul gagal ataupun berhasil 5 Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (konvensional) maupun dengan cara yang diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (violence) 6 Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih

pimpinan Negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. terdapat lima penyebab timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik yaitu :

a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial, masalah siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik.

c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern, ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

d. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jika timbul konflik antar elit maka yang dicari adalah dukungan

rakyat, terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristocrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.

e. Keterlibatan pemerintahan yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang teroganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.⁵⁰

Kegiatan politik yang tercangkup dalam konsep paertisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk intesitas. Biasanya diadakan pengamatan jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu besar sekali. Sebaliknya, kecil jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencangkup antara lain menjadi pemimpin dari paretai atau kelompiok kepentingan.

4. Model partisipasi Politik

Kesadaran politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berdasarkan fenomena ini maka W.Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe

1) apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepadapemerintah tinggi nmaka partisipasi politik cenderung aktif

2) Sebaliknya kesadaran dan kepercayaan sangat kecil maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

⁵⁰ Myron Weine dalam Rahman (2007:286)

3) Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal.

4) Kesadaran politik rendah tetapi kepercayaan pada pemerintah tinggi maka partisipasinya menjadi sangat pasif, artinya hanya berorientasi pada output politik.

Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri (variable independent) artinya tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi faktor lain seperti status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, pengalaman berorganisir. Oleh karena itu hubungan dari faktor-faktor itu dapat di gambarkan sebagai berikut : status sosial dan ekonomi, afiliasi politik, pengalaman berorganisir merupakan variable pengaruh/independent. Kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah sebagai variable antara/intervening variables dan partisipasi politik merupakan terpengaruh (dependen).

5. Partisipasi Politik Perempuan

Perjuangan dalam menggalakan perempuan di parlemen bukan hanya memperjuangkan kuantitas saja tetapi, hal yang paling penting adalah kualitas perempuan. Bagaimana perempuan dapat memiliki kepekaan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan keadilan. Keikutsertaan perempuan dalam politik dapat menyumbangkan pemikiran terhadap permasalahan politik yang sangat di perlukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan perempuan harus ikut dalam pengambilan kebijakan:

1. Perempuan adalah separuh penduduk dunia sehingga secara demokratis pendapat dari perempuan harus di pertimbangkan. Dalam demokrasi pandangan kelompok-kelompok yang berbeda jenis harus diformulasikan dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan.

2. Partisipasi politik perempuan diharapkan dapat mencegah kondisi yang menguntungkan bagi kaum

perempuan dalam menghadapi masalah stereotipe terhadap perempuan, diskriminasi dibidang hukum, kehidupan sosial dan kerja dan juga eksploitasi terhadap perempuan.

3. Partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan politik dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan politik yang mengutamakan maian.

4. Keterwakilan politik perempuan dalam parlemen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang publik juga akan mempertimbangkan perpektif gender tersebut.

6. Hak politik perempuan

Pendapat pertama, Al-maududi menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.

Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum.

Ibnu Abidin berkata: "Menetapkan perempuan dalam tugas kepemimpinan, tidak diragukan lagi ketidaksahannya, karena perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memikul

tugas itu." Adapun yang dia maksudkan dengan kemampuan itu adalah kemampuan memimpin⁵¹.

Pendapat kedua, menurut Ibnu Hazm, boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar bin Khathab bahwa dia mengangkat Asy-Syifa seorang perempuan dari kaumnya untuk memberikan pelajaran membaca dan menulis. Jika ada yang berkata: "Bukankah Rasulullah SAW

telah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan. Maka kami akan menjawab: "hadis tersebut sesungguhnya hanya merupakan komentar Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu mendengar Putri Kisra diangkat menjadi pemimpin Persi menggantikan ayahnya yang meninggal dunia."⁵²

Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan politik dan pemerintahan.⁵³

Menurut Farid Abdul Khaliq bahwa yang benar menurut kami adalah bahwa Islam tidak mengharamkan perempuan untuk mengambil dan melakukan hak-hak politik ini, juga tidak menutupi persamaannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Islam juga tidak menghalangi aktivitas berpolitiknya atau menghalanginya untuk ikut serta dalam anggota majelis permusyawaratan dalam mengusulkan undang-undang atau pengawasan atas para pejabat, dimulai dari kewajiban menasihati, selanjutnya meminta pertanggungjawaban secara berangsur-angsur dan terakhir sebagai hak atau wewenang majelis permusyawaratan; memberhentikan penguasa atau menghancurkan

⁵¹ Farid Abdul Khalid, "al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah, Terj. Fathurrahman a. Hamid, 'Fikih Politik Islam,'" in *Amzah* (Jakarta, 2005), hal. 123.

⁵² *Ibid*, 127.

⁵³ *Ibid*.

pemerintahannya. Islam juga tidak melarang perempuan menduduki jabatan kementerian atau jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak ada nash yang jelas dan pasti dalam Al-Qur'an dan sunnah yang melarang hal demikian.⁵⁴



⁵⁴Farid Abdul Khaliq, *al-Fiqh as-Siyasiy* ...,128.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Akbar, Ali, "Merawat Cinta Kasih," in *Pustaka Antara* (Jakarta, 1978)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Budiardjo, Miriam, *dasar dasar ilmu politik* (Jakarta, 2008)
- Hasan, Iqbal, *Analisis data penelitian dengan statistik* (Jakarta: Bumi aksara, 2004)
- Husman, Husein, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian* (Jakart: Setiawan Pers, 1999)
- Khalid, Farid Abdul, "al-Fiqh as-Siyasiy al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah, Terj. Fathurrahman a. Hamid, 'Fikih Politik Islam,'" in *Amzah* (Jakarta, 2005), hal. 123
- Laonso, Hamid, Muhammad Jamil, dan Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam, alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer* (Restu Ilahi, 2005)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Narbuko, Kholid, dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- pasolong abani, "teori administrasi publik," in *alfabata* (bandung, 2010)
- RI, Departemen Agama, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," hal. 578

Soeptjipto, Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana.
Jakarta Penerbit Buku Kompas

Jurnal

mahsun, muhammad, *pengukuran kinerja sektor publik* (malang, 2018)

Hidayat,taufik “*pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian*” vol.1 (purwokerto,2019)

Huriani, yeni, taufik,M.rahman, *dkk ” Developing Gender-Based Justice Relationships in Indonesian Families During*” vol 3 no.1 (Cirebon 2021)

Rizal,ahmad. *kinerja anggota legislative edisi-3*” (makasar,2021)

Firmansyah,deri, *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review* .Vol. 1 No. 2 (sukabumi 2022)

Praja,widia , *model pengukuran akuntabilitas kinerja dprd dalam konteks good governance* . vol.45 no.02 (2019)

Web

“Angka Kekerasan di Kabupaten Pesawaran”
<https://kupastuntas.co/2022/08/18/ada-16-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-pesawaran-pada-januari-juli-2022>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pesawaran

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Pesawaran

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesawaran